

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Setiap negara memiliki sistem pemerintahannya sendiri untuk menjalankan kehidupannya. Begitu juga di Indonesia, pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua bagian yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah melaksanakan amanat untuk menjalankan tugas pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk memungut berbagai macam jenis pendapatan dari rakyat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran untuk penyelenggaraan di tingkat pusat maupun daerah.

Reformasi yang dimulai beberapa tahun lalu di Indonesia telah merambah hampir keseluruhan aspek kehidupan. Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 melahirkan pergeseran kewenangan pemerintah daerah, dari yang semula sentralistik birokratik menjadi pemerintahan yang desentralistik partisipatoris. Ada dua alasan mengapa perubahan ini harus dilakukan, yaitu pertama adalah pelimpahan berbagai wewenang dan urusan kepada daerah akan mengakibatkan manajemen keuangan daerah menjadi semakin kompleks. Kedua adalah Tuntutan publik akan pemerintah yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen

keuangan daerah baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban.

Menurut PP No. 8 tahun 2008 pasal 2 menjelaskan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Maka, selain pelaporan keuangan, pemerintah juga harus membuat informasi mengenai prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan.

Kinerja instansi pemerintah adalah hasil atau tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara keseluruhan sesuai dengan tujuan yang sebelumnya telah direncanakan dalam periode tertentu. Penentuan tujuan adalah proses menentukan tingkat performa yang spesifik. Tujuan berfungsi sebagai motivator yang menyebabkan orang-orang membandingkan kapasitas mereka saat ini yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang spesifik dan sulit, dengan umpan balik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Artinya bahwa tujuan yang spesifik akan meningkatkan kinerja, tujuan yang sulit ketika diterima akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibanding tujuan yang mudah dan umpan balik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dari pada tanpa umpan balik (Sunyoto dan Burhanuddin, 2011:34).

Menurut Chabib dan Suropto (2011:12-16) terdapat beberapa dimensi yang perlu memperoleh perhatian dalam menilai atau mengukur kinerja pemerintah daerah, yaitu pertama dimensi keuangan, dimensi ini meliputi

kemampuan pemda dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan PAD dan mengurangi celah fiskal daerah serta kemampuan pemda dalam memperbaiki struktur belanja daerah. Hal ini penting, mengingat dewasa ini persentase belanja pegawai pada umumnya masih sangat besar dibandingkan dengan belanja modal. Kedua yaitu dimensi kepuasan masyarakat daerah, tingkat kepuasan masyarakat tentu akan sangat bervariasi tergantung pada tingkat besarnya harapan atas pelayanan yang seharusnya diberikan. Kewajiban pimpinan unit organisasi dilingkungan pemerintah daerah secara terus menerus menggali informasi atas tingkat pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat dan meresponnya dalam bentuk tindakan nyata, sesuai harapan masyarakat yang menggajinya. Ketiga yaitu dimensi operasi kegiatan, informasi operasional kegiatan secara internal sangat diperlukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa secara keseluruhan berfokus pada upaya pencapaian misi dan visi kepala daerah tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keempat yaitu dimensi kepuasan pegawai, pegawai adalah aset terpenting yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini tidak dinilai berdasarkan jumlahnya, tetapi harus dinilai berdasarkan mutu atau kualitasnya. Kelima yaitu dimensi kepuasan para pemangku kepentingan, kinerja pemda sering diukur berdasarkan sudut pandang dan kepentingan para pihak yang jadi pemangku kepentingan, informasi kinerja pemda perlu didesain dan disusun berdasarkan kebutuhan dari para pemangku kepentingan seperti DPRD, pemasok, pelanggan, bahkan masyarakat luas akan memperoleh gambaran kinerja pemerintah daerah sesuai dengan sudut pandang

dan kepentingan mereka masing masing. Terakhir yaitu dimensi waktu, ukuran waktu merupakan hal yang tidak boleh dilupakan oleh pemerintah daerah dalam mendesain pengukuran kinerja. Ketetapan waktu penyampaian menjadi penting, oleh karena informasi tersebut merupakan bahan bagi semua pihak yang memerlukan informasi dalam pengambilan keputusan.

Pelaporan kinerja instansi pemerintah daerah sangat penting dilakukan, karena dapat dijadikan sebagai alat motivasi dalam meningkatkan kinerja di periode selanjutnya, dengan cara memperbaiki masalah-masalah yang sebelumnya terjadi. Selain itu, pelaporan kinerja juga dapat dijadikan sebagai alat mendemonstrasikan proses akuntabilitas instansi pemerintah sehingga instansi pemerintah tersebut mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam menjalankan programnya.

Fenomena yang terjadi di instansi pemerintah daerah yaitu pada tahun 2012, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung soroti kinerja pejabat di enam Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemkot Bandung yaitu Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP), Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu (BPPT), Bagian Hukum, dan Inspektorat. Hal itu mencuat dalam Rapat Paripurna Pembacaan Rekomendasi DPRD Kota Bandung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Bandung 2011 di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa (1/5), yang dibacakan oleh Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan.

Dalam pembacaan rekomendasi tersebut, DPRD menyoroti soal rendahnya kualitas pembangunan dan perbaikan jalan di Kota Bandung. DPRD mensinyalir, umur kebanyakan jalan di Kota Bandung hanya enam bulan pasca pembangunan maupun pemeliharaan. Hal itu disebabkan salah perencanaan dari awal, kurang pengawasan, dan lemahnya komitmen moral pihak ketiga sebagai pelaksana pembangunan.

DPRD juga menyangsikan laporan DBMP mengenai *over target* pembangunan saluran air dan klaim mengenai berkurangnya titik-titik banjir di Kota Bandung. Erwan mengatakan kenyataan di lapangan setiap turun hujan, Kota Bandung selalu digenangi banjir Cileuncang, bahkan di titik-titik yang disebutkan sudah berkurang sekalipun. Erwan juga mengatakan, kelemahan perencanaan dalam menetapkan target-target capaian kinerja, juga harus ditindaklanjuti dengan evaluasi kinerja Bappeda. Selain itu, banyaknya temuan pada hasil pemeriksaan BPK pada setiap SKPD termasuk Inspektorat sendiri, dianggap DPRD mencerminkan lemahnya pengawasan internal Inspektorat.

Di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, DPRD melihat belum maksimalnya komitmen pemkot dalam menindaklanjuti amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. DPRD juga menyoroti banyaknya Perwal maupun Kepwal yang belum juga keluar padahal sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh perda itu sendiri. Misalnya Kepwal mengenai penetapan bangunan cagar budaya golongan B dan C yang tak kunjung selesai, menyebabkan enam bangunan cagar budaya diratakan dengan tanah, Perwal dan

Kepwal tentang aset, Perwal tentang Pasar Modern, serta Perwal dan Kepwal mengenai Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung.

Sementara itu di bidang perhubungan, kisruh yang terjadi dalam operasionalisasi TMB juga disebutkan menjadi indikator ketidakberhasilan Dishub. Pada 2011, sebanyak 5.981 izin reklame dikeluarkan BPPT, atau 99,68% capai target. Akan tetapi nilai pajaknya hanya tercapai 50% atau Rp 16,8 miliar dari target Rp 32,7 miliar (<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2012/05/01/186848/dprd-kota-bandung-soroti-kinerja-enam-skpd> diakses tanggal 24 Desember 2017).

Adapun fenomena lainnya yaitu pada tahun 2016, Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Riantono, prihatin sampah masih menjadi masalah besar di Kota Bandung. Riantono mengatakan, Pemkot Bandung sudah memberikan subsidi kepada PD. Kebersihan sebesar Rp. 105 miliar, sesuai dengan permintaan mereka. Kemudian ada tambahan dana untuk penyapu jalan di kewilayahan yang menyebabkan anggaran dana tersebut berbeda dengan anggaran yang ada di PIPPK. Riantono juga mengatakan di setiap kewilayahan sudah ada anggaran, sekitar Rp 53 miliar, untuk kebersihan taman dan jalan, untuk 151 kelurahan. terangnya. Selain itu Riantono menerangkan bahwa semua tarif dikelola oleh PD. Kebersihan tersebut, tidak masuk ke APBD karena mereka BUMD. Oleh karena itu, mereka mengelola keuangan sendiri. Dengan masih menjadi masalah di Kota Bandung, berarti pengelolaan sampah belum baik.

(<http://ayobandung.com/read/20160326/64/8360/anggaran-sampah-bandung-besar-kok-masih-masalah> diakses tanggal 24 Desember 2017).

Kemudian pada tahun 2017, tingkat akuntabilitas sebagian besar pemerintah daerah masih tergolong rendah. Hal itu terungkap dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LHE AKIP) tahun 2016 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menteri PAN-RB Asman Abnur menyerahkan LHW AKIP kepada pemerintah kabupaten/kota dalam regional satu wilayah Sumatera, Banten, dan Jawa Barat di Hotel Grand Panghegar, Kota Bandung, Rabu (25/1/2017).

Dalam regional satu, sebanyak 172 pemerintah kabupaten/kota telah dievaluasi Kementerian PAN-RB. Satu daerah mendapat predikat dan 3 pemerintah kabupaten kota mendapat predikat BB, 17 predikat B, 81 predikat CC, 69 berpredikat C, dan satu kabupaten dengan predikat D. Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 2016 menunjukkan peningkatan rata-rata nilai evaluasi pada kabupaten/kota di Bandung tahun 2015. Rata-rata nilai evaluasi SAKIP kabupaten/kota 49,87 atau meningkat dari tahun 2015 yang hanya 46,92. Meski nilai rata-rata meningkat, sebanyak 425 kabupaten/kota atau 83 persen dari total seluruh kabupaten/kota di Indonesia masih mendapat nilai di bawah predikat B.

Asman mengatakan, masih rendahnya tingkat akuntabilitas kabupaten/kota itu terjadi karena empat masalah. Selain karena tujuan atau sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan pun tidak jelas dan terukur, program/kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, serta rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan. Keempat permasalahan tersebut menciptakan inefisiensi penggunaan anggaran pada instansi

pemerintahan. Jika mengacu pada hasil evaluasi dan berdasarkan data yang telah dihitung, ada potensi pemborosan minimal 30% dari APBN/APBD di luar belanja pegawai setiap tahun. (<http://regional.kompas.com/read/2017/01/25/10531751/tingkat.akuntabilitas.pemda.masih.rendah> diakses tanggal 24 Desember 2017).

Terakhir pada Desember 2017, hasil survei *Transparency Internasional Indonesia* (TII) tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang menempatkan Kota Bandung sebagai kota dengan persentase suap tertinggi hingga mencapai 10,8 % dari total biaya produksi telah mengagetkan banyak pihak. Tak pelak, kinerja Walikota Bandung Ridwan Kamil kini menjadi sorotan publik. Terkait hal itu, sejumlah pengamat turut menanggapi masalah tersebut.

Menurut Jerry Massie, Ph.D pengamat kebijakan publik dari *Indonesian Public Institute* (IPI), hasil survei yang menempatkan Kota Bandung sebagai kota dengan persentase suap tertinggi menunjukkan ada anomali antara persepsi dan realita. Pasalnya, dalam persepsi publik Ridwan Kamil dinilai bersih dan berhasil membangun Kota Bandung. Tapi, kenyataannya sekarang Kota Bandung malah mendapat predikat buruk sebagai kota paling tinggi tingkat persepsi suapnya. Jerry memaparkan, terkait dengan IPK Kota Bandung, publik bisa melihat rekam jejak (*track record*) berdasarkan data runtun waktu (*time series*) dalam beberapa tahun sebelumnya yaitu 2015 hingga 2017.

Jerry menyebut, pada 2015, Indeks Persepsi Korupsi Kota Bandung berada di level paling rendah. Artinya, Kota Bandung menjadi kota paling korup dari 11 kota yang disurvei TII. Survei dilakukan serentak pada 20 Mei – 17 Juni 2015 kepada 1,100 pengusaha dengan menggunakan metode penarikan sampel



stratified random sampling. Dari data survei TII tersebut diperoleh data kota yang memiliki skor IPK tertinggi adalah Kota Banjarmasin dengan skor 68, Kota Surabaya 65 dan Kota Semarang dengan skor 60. Kota yang memiliki skor terendah adalah Kota Bandung dengan skor 39.

Terkait dengan tingginya persepsi suap Kota Bandung tahun 2017, Jerry mengungkapkan, hal itu disebabkan karena lambannya proses perizinan yang dikeluhkan para pelaku usaha. Proses perizinan yang terlalu lama dan berbelit-belit menjadi salah satu faktor terjadinya transaksi suap antara birokrat dan pengusaha. Kondisi tersebut biasanya sengaja diciptakan agar pengusaha meminta percepatan keluarnya izin. Jerry menegaskan, tingginya persepsi suap Kota Bandung di tahun 2017 ini menunjukkan Pemkot Bandung telah gagal membangun tata kelola perizinan yang cepat dan bebas suap.

Senada dengan Jerry, pengamat pemerintahan dari *Local Government Institute Studies* Bambang Wisono menyatakan, praktek suap di Pemkot Bandung di bidang perijinan berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh TII untuk tahun 2017, terparah dibanding tahun 2015 & 2016. Bambang mengungkapkan bahwa pimpinan instansi perijinan di tahun sebelumnya sudah berusaha memperbaiki sistem prosedur perijinan yang bertujuan untuk memberantas suap, namun tahun ini setelah berganti pimpinan, hal tersebut tidak bisa ditingkatkan atau minimum dipertahankan. Perijinan menjadi lebih lambat, pelaku usaha dirugikan dan malah memicu lebih maraknya suap.

Terpisah, pengamat politik Karyono Wibowo mengatakan, predikat Kota Bandung yang dinobatkan sebagai kota dengan persepsi suap tertinggi bisa

mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap Ridwan Kamil karena sebagian masyarakat akan membuat kesimpulan bahwa tingginya persepsi suap Kota Bandung merupakan kegagalan RK dalam mengelola pemerintahan yang bersih. Diberitakan sebelumnya, dalam survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2017 yang dirilis Rabu 22 November 2017 lalu di Jakarta, TII menyebut persepsi suap di Kota Bandung mencapai 10,8% dari total biaya produksi. Makassar diketahui sebagai kota dengan persepsi suap terendah, yakni 1,8% dari total biaya produksi.

Ada 12 kota di Indonesia yang disurvei oleh TII. Bandung dipilih sebagai representasi Jawa Barat. Ke-12 kota tersebut adalah Bandung, Jakarta Utara, Pontianak, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Padang, Manado, Surabaya, Semarang, Makassar, dan Medan. Survei yang dikerjakan sepanjang Juli hingga Agustus 2017 tersebut melibatkan 1.200 pelaku usaha sebagai responden (<https://triknews.net/15817/06/12/2017/suap-di-kota-bandung-tinggi-kinerja-ridwan-kamil-disorot.html> diakses pada 5 Januari 2018).

Fenomena-fenomena diatas menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kota Bandung masih tidak sesuai dengan beberapa dimensi pengukuran kinerja instansi pemerintah yang seharusnya. Pada dimensi keuangan, masih adanya celah fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas. Terbukti pada fenomena ketika DPRD soroti enam SKPD di kota Bandung yang disebabkan oleh rendahnya kualitas pembangunan dan perbaikan jalan di Kota Bandung. Kemudian adanya laporan DBMP mengenai *over target* pembangunan saluran air serta banyaknya temuan pada hasil pemeriksaan BPK pada setiap

SKPD termasuk Inspektorat sendiri dan juga pajak yang hanya tercapai 50%. Fenomena yang tidak sesuai dengan dimensi keuangan juga ditunjukkan ketika anggaran sampah tidak sesuai dengan anggaran PIPPK yang terjadi tahun 2016, pada tahun 2017 terjadi inefisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintahan dan pada Desember 2017 kota Bandung ditempatkan sebagai kota dengan persentase suap tertinggi.

Pada dimensi waktu terjadi ketika DPRD menyoroti banyaknya Perwal maupun Kepwal yang belum juga keluar padahal sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh perda itu sendiri. Kemudian pada dimensi operasi kegiatan terjadi ketika tingkat akuntabilitas masih rendah karena empat masalah, yaitu tujuan atau sasaran yang ditetapkan, tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan pun tidak jelas dan terukur, program/kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, serta rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan. Hal-hal tersebut dianggap tidak sesuai karena tidak berfokus pada visi dan misi yang sebelumnya telah ditetapkan.

Fenomena yang terjadi pada Desember 2017 ketika Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang menempatkan Kota Bandung sebagai kota dengan persentase suap tertinggi, fenomena tersebut tidak hanya menunjukkan ketidaksesuaian dengan dimensi keuangan, fenomena tersebut juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan dimensi kepuasan para pemangku kepentingan. Hal ini dikarenakan lambannya proses perizinan yang dikeluhkan para pelaku usaha yang mengakibatkan adanya suap.

Demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik maka pemerintah mencoba mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *good governance*. Menurut Sedarmayanti (2012:10) terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunana dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Kemudian menurut Hardiwinoto dalam Handi dan Bambang (2014) prinsip-prinsip *good governance* akan menjamin terciptanya pertumbuhan ekonomis. Prinsip-prinsip tersebut dapat mencerminkan kinerja pemerintah daerah untuk suatu periode tertentu.

Menurut *World Bank* dalam Mustafa (2013:187) *Good Governance* didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi. Baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Banyak faktor yang memengaruhi kinerja pemerintah diantaranya adalah komitmen organisasi dan budaya organisasi. Angel dan Perry dalam Kurniawan (2013) mengemukakan bahwa komitmen organisasi yang kuat akan mendorong para individu untuk berusaha lebih keras dalam mencapai tujuan organisasi.

Sehingga komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi dari pada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik lagi. Diantara komitmen organisasi dengan kinerja terdapat pengaruh yang positif dimana kinerja yang baik pasti dilatar belakangi oleh komitmen yang kuat. Komitmen organisasi yang buruk tidak menghasilkan kinerja yang tinggi. Jadi, semakin tinggi derajat komitmen organisasi semakin tinggi pula kinerja yang dicapainya. Menurut Wirawan (2013:713) komitmen organisasi adalah perasaan keterkaitan atau keterikatan psikologis dan fisik pegawai terhadap organisasi tempat ia bekerja atau organisasi dimana ia menjadi anggotanya. Keterkaitan psikologis artinya pegawai merasa senang dan bangga bekerja untuk atau menjadi anggota organisasi. Keterkaitan atau keterikatan tersebut mempunyai tiga bentuk yaitu mematuhi norma, nilai-nilai dan peraturan organisasi. Para anggota organisasi yang mempunyai komitmen akan mematuhi petaraturan, kode etik dan standar kerja organisasi. Mereka akan mengidentifikasi dirinya dengan organisasi, ia menyatakan dengan sadar bahwa mereka merupakan bagian dari organisasi.

Faktor yang tidak kalah penting berpengaruh pada kinerja organisasi selain komitmen organisasi adalah budaya organisasi. Menurut Sheridan dalam Ramadentinata dan Anita (2013) Budaya organisasi mengikat para karyawan yang bekerja di dalamnya untuk berperilaku sesuai dengan budaya organisasi yang ada. Apabila pengertian ini ditarik ke dalam organisasi, maka seperangkat norma sudah menjadi budaya dalam organisasi sehingga karyawan harus bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan budaya yang ada tanpa merasa terpaksa.

Keberadaan budaya dalam organisasi akan menjadi perekat dan pedoman dari seluruh kebijakan perusahaan serta tuntutan operasional bagi aspek-aspek lain dalam organisasi. Jika nilai-nilai budaya telah menjadi pedoman dalam pembuatan aturan organisasi, maka budaya perusahaan akan mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja organisasi. Hal tersebut berarti bila budaya organisasinya baik maka kinerja organisasi juga akan baik. Menurut Schein dalam Wirawan (2013:725) mendefinisikan budaya organisasi adalah berbagi suatu pola asumsi dasar yang dipelajari oleh kelompok ketika mereka menyelesaikan problem-problem mengadaptasi keadaan lingkungan eksternal dan integrasi internal, yang telah berlangsung dengan cukup baik untuk dianggap valid dan karena itu diajarkan kepada para anggota organisasi baru sebagai persepsi cara yang benar.

Kemudian ada faktor lain yang memengaruhi kinerja yaitu pengendalian internal menurut AICPA dalam Amin Widjaja Tunggal (2013:30) Pengendalian internal berisi rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran yang diterapkan di perusahaan untuk mengamankan aset, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.

Selain teori-teori tersebut, ada beberapa penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya diantaranya oleh Ira Amelia dkk. (2014) dengan judul “Pengaruh *Good Governance*, Pengendalian *Intern* dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan)”. Hasil Penelitian ini menunjukkan *good governance* dan pengendalian *intern* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah

Kabupaten Pelalawan, sedangkan budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Pelalawan. Kemudian penelitian oleh Muhammad Kurniawan (2013) dengan judul “Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kerinci)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan budaya organisasi berpengaruh signifikan positif pada kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kerinci.

Berdasarkan teori dan uraian diatas dan didukung oleh beberapa fakta yang ada, penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai **“Pengaruh *Good Governance*, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Survey pada SKPD di Wilayah Kota Bandung)”**.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kurniawan (2013) dengan judul “Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kerinci)” dan penelitian yang dilakukan oleh Ira Amelia dkk. (2014) dengan judul “Pengaruh *Good Governance*, Pengendalian *Intern* dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan).”

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana *Good Governance* yang ada pada Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Bandung.
2. Bagaimana Komitmen Organisasi pada Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Bandung.
3. Bagaimana Budaya Organisasi pada Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Bandung.
4. Bagaimana Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Bandung.
5. Bagaimana Pengendalian Internal yang ada pada SKPD Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh *Good Governance*, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Bandung secara simultan.
7. Seberapa besar pengaruh *Good Governance*, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Bandung secara parsial.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian mengenai pengaruh *Good Governance*, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Bandung.



### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *Good Governance* yang ada pada Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Komitmen Organisasi pada Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Budaya Organisasi pada Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Instansi pada Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengendalian Internal pada Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Good Governance*, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Bandung secara simultan.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Good Governance*, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Bandung secara parsial.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagi penulis
  - a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh ujian sidang dan untuk meraih gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah sistem informasi akuntansi.
  - c. Hasil penelitian ini juga dapat melatih kemampuan secara teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang

sama yaitu *Good Governance*, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

### 3. Bagi Pemerintah

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keadaan *Good Governance*, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Bandung.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja instansi Pemerintah Daerah Kota Bandung.

### 4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awam mengenai pengaruh *Good Governance*, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada SKPD kota Bandung.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam memperbanyak pengetahuan yang berhubungan dengan *Good Governance*, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada SKPD kota Bandung . Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai seberapa besar pengaruh *Good*

*Governance*, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada SKPD kota Bandung.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada tujuh belas Dinas di Pemerintah Kota Bandung, yaitu:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung
2. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung
3. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung
6. Dinas Kesehatan Kota Bandung
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung
8. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung
9. Dinas Penataan Ruang Kota Bandung
10. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung
11. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan  
Pertamanan Kota Bandung
12. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung
13. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
14. Dinas Pendidikan Kota Bandung
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung
16. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung
17. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bandung